

ANALISIS *STAKEHOLDERS* DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ARKEOLOGI DI KOTA CINA, MEDAN

Stanov Purnawibowo dan Lucas Partanda Koestoro

Balai Arkeologi Medan, Jalan Seroja Raya Gang Arkeologi No.1 Medan
anop_siva@yahoo.com

Abstract. *Stakeholders Analysis in the Archaeological Resources Management at Kota Cina, Medan.* Stakeholders analysis aims to determine the policies and potencies of conflict management among stakeholders in Kota Cina. The method used is classification of the issues related to the management of archaeological remains in Kota Cina. These issues provide a general overview of the potential conflicts that occurred in Kota Cina. The potential conflicts are then analyzed using one of the tools of conflict analysis, namely "onion analysis". The analysis shows similarity of need that inflicts conflict, which is land use. Better conflict management for the long term is to negotiate. Negotiations can be formed as a forum of discussion to reach a mutual agreement that can accommodate the stakeholders' interests. Mutual agreement is linked to the empowerment of communities around Kota Cina, especially the land owners, to create awareness in preserving the archaeological resources in Kota Cina.

Keywords: *Stakeholders analysis, Kota Cina, Conflict, Management, Negotiation*

Abstrak. Analisis *stakeholders* bertujuan untuk mengetahui potensi dan kebijakan pengelolaan konflik antarpemangku kepentingan di kawasan Kota Cina, Medan. Metode yang digunakan berupa mengklasifikasikan sejumlah isu yang terkait dengan pengelolaan tinggalan arkeologis di Kota Cina. Isu tersebut memberikan gambaran umum tentang potensi konflik yang terjadi di Kota Cina. Potensi konflik itu selanjutnya dianalisis dengan menggunakan salah satu alat analisis konflik, yaitu analisis bawang bombay. Hasil analisis menunjukkan adanya kesamaan kebutuhan yang menjadi simpul konflik, yaitu penggunaan lahan. Pengelolaan konflik yang baik untuk jangka panjang dalam proses pengelolaan Kota Cina adalah dengan negosiasi. Negosiasi dapat berupa musyawarah untuk menemukan kesepakatan bersama yang mampu mengakomodasi para pemangku kepentingan. Kesepakatan tersebut terkait dengan pemberdayaan warga masyarakat di sekitar Kota Cina, khususnya para pemilik lahan, dalam mewujudkan sikap positif dan kesadaran mereka terhadap pelestarian sumber daya arkeologis di Kota Cina.

Kata Kunci: Analisis *stakeholders*, Kota Cina, Konflik, Manajemen, Negosiasi

1. Pendahuluan

Kota Cina adalah suatu kawasan di pesisir timur Sumatera Utara yang mengandung beragam sumber daya arkeologis dari abad XII hingga abad XIV Masehi. Secara administrasi Kota Cina berada di Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kawasan tersebut secara geografis terletak pada posisi 03°43'06,6" -- 03°43'22,2" LU dan 98°39'0,2" -- 98°39'24,8" BT. Seluruh wilayah yang mengandung temuan arkeologis

luasnya mencapai lebih kurang 25 hektar yang meliputi Danau Siombak dengan temuan sisa perahu dan fragmen gerabah; Kota Cina dengan temuan struktur bata, umpak, fragmen gerabah, fragmen keramik, fragmen logam, fragmen kaca, dan koin Cina; Keramat Pahlawan dengan temuan struktur bata, fragmen keramik, fragmen gerabah, batu berpahat, dan dua arca logam; serta Lorong IX dengan temuan arca batu, fragmen lingga, dan fragmen yoni. Penyebutan kawasan untuk Kota Cina merujuk pada Pasal 1 ayat (6)

Naskah diterima tanggal 10 Februari 2016, diperiksa 10 Maret 2016, dan disetujui tanggal 14 Maret 2016.

UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan demikian, terminologi Kota Cina dapat dikategorikan sebagai kawasan, sedangkan penyebutan situs sudah sebaiknya ditinggalkan.

Lokasi Kota Cina pertama kali dicatat keberadaannya pada 1823 oleh Anderson (1826: 294). Atas perintah W. E. Philips, Gubernur Penang, Anderson mengunjungi sejumlah daerah di pantai timur Sumatera Utara untuk melakukan survei politik dan ekonomi bagi kepentingan East India Company (EIC). Dalam laporannya terdapat bagian yang menjelaskan bahwa pada lokasi yang sekarang dikenal sebagai kawasan Kota Cina ditemukan sebuah batu bertulis berukuran besar, yang tulisannya tidak dapat dibaca oleh penduduk yang bermukim di sana.

Kawasan Kota Cina merupakan daerah pesisir. Hal itu dapat diidentifikasi melalui pengaruh pasang surut dan pasang naik air laut yang tampak di beberapa saluran anak sungai atau *parit* (bahasa setempat) yang ada di kawasan tersebut. Vegetasi pesisir masih mendominasi kawasan itu, di antaranya pohon nipah (*Nypa fruticans*) dan *mangrove* (*Rhizophora sp.*), walaupun saat ini populasi *mangrove* sudah mulai berkurang. Proses sedimentasi sungai mengubah kawasan itu menjadi daratan yang jauh dari laut seperti kondisinya sekarang, sekitar delapan kilometer dari Muara Sungai Deli di Selat Malaka (Gambar 1). Bukti bahwa kawasan itu merupakan pesisir diketahui dari adanya lapisan sedimen *molusca* laut jenis



Gambar 1. Peta Lokasi Kawasan Kota Cina (Sumber: Balai Arkeologi Medan)

bivalve yang berasosiasi dengan temuan artefak berupa fragmen keramik dan gerabah pada beberapa kotak ekskavasi di kawasan tersebut (BPCB Aceh Besar 2012: 16; Chabot *et al.* 2013: 127).

Beragam tinggalan arkeologis yang terdapat di kawasan Kota Cina pada saat ini kondisinya terancam oleh perkembangan kebutuhan permukiman masyarakat yang berpotensi merusak dan menghilangkan data arkeologisnya. Aktivitas yang mengancam hilangnya data arkeologis tersebut berupa kegiatan perataan tanah untuk pembangunan permukiman yang bersebelahan dengan struktur bangunan bata lama yang berasosiasi dengan fragmen logam, fragmen keramik, fragmen gerabah, manik-manik, dan uang logam lama dari Cina (Oetomo, Deni Sutrisna, dan Churmatin Nasoichah 2015: 3-5). Kondisi itu mengindikasikan adanya potensi konflik antarpemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengelolaan tinggalan arkeologis di kawasan Kota Cina pada masa yang akan datang.

Pengertian *stakeholder* dalam penelitian ini adalah individu ataupun kelompok tertentu yang berkepentingan terhadap pengelolaan tinggalan masa lalu di kawasan Kota Cina. Pengelolaan tinggalan arkeologis dimaknai sebagai suatu upaya terpadu dalam rangka melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan tinggalan masa lalu tersebut melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, untuk kesejahteraan rakyat (Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Secara garis besar ada tiga kelompok *stakeholders*, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat (Purba 2002: 151). Dalam konteks pengelolaan sumber daya arkeologi, *stakeholders* dunia usaha dilebur dengan masyarakat dan posisinya digantikan oleh akademisi sehingga dalam konteks penelitian ini *stakeholders* yang terkait dengan pengelolaan kawasan Kota Cina adalah pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi konflik dan cara pengelolaan konflik antar pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan kawasan Kota Cina pada masa yang akan datang sehingga konflik tersebut tidak merusak tinggalan arkeologisnya. Pengkajian atau analisis *stakeholders* ditujukan untuk mengetahui ragam kepentingan dan potensi konflik antarpemangku kepentingan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan kebijakan pengelolaan konflik antarpemangku kepentingan serta bagaimana mengakomodasi berbagai kepentingan yang muncul dalam pengelolaan kawasan Kota Cina.

Berkenaan dengan hubungan antara tinggalan arkeologis dan masyarakat, Little (2002: 3) berpendapat bahwa pekerjaan arkeologi yang umumnya didanai oleh masyarakat harus memberikan keuntungan tidak hanya kepada kepentingan arkeologi, tetapi juga keuntungan kepada masyarakat. Senada dengan pendapat tersebut, menurut Hodder (2011: 21), pada dasarnya masyarakat yang berinteraksi langsung dengan suatu tinggalan arkeologis memiliki hak untuk turut serta dalam menentukan masa depan tinggalan arkeologis tersebut. Tentu saja dalam konteks ini, arkeolog memiliki kewajiban atau berperan sebagai fasilitator serta pengontrol dalam kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya arkeologi bersama masyarakat.

Berkaitan dengan paradigma yang berorientasi pada masyarakat, Okamura dan Matsuda berpandangan bahwa fenomena tersebut merupakan suatu jalinan relasi antara masyarakat dan arkeologi. Mereka memaknai arkeologi publik sebagai subjek yang menjelaskan relasi antara arkeologi dan masyarakatnya, kemudian mengevaluasinya. Lebih lanjut, keduanya mengatakan bahwa arkeologi publik tidak semata-mata mendeskripsikan berbagai hubungan antara arkeologi dan masyarakat, tetapi juga secara aktif mengubah dan mengembangkan hubungan tersebut (Okamura

dan Matsuda 2011: 1-3).

Relasi antara sumber daya arkeologi, akademisi (dalam hal ini adalah peneliti arkeologi), masyarakat, dan pemerintah berpotensi memunculkan konflik. Konflik secara sederhana dipahami sebagai situasi ketika dua pihak atau lebih menginginkan hal yang sama secara bersamaan, tetapi pihak lain menghalangi, sehingga tujuan salah satu pihak menjadi terhalang (Heffelbower 2001 dalam Setyowati 2012: 2). Salah satu penyebab munculnya konflik yang relevan dengan konflik antar-*stakeholders* dalam pengelolaan kawasan Kota Cina adalah kebutuhan manusia. Hal itu mengasumsikan bahwa konflik yang disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia--fisik, mental, dan sosial--ada sesuatu yang tidak terpenuhi atau dihalangi (Fischer *et al.* 2001: 8). Pengelolaan kawasan Kota Cina yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan tidak akan berhasil tanpa adanya manajemen atau pengelolaan konflik dengan baik. Perbedaan pendapat dan timbulnya konflik antar pemangku kepentingan hendaknya diselesaikan secara bijaksana sehingga tercipta kondisi dan situasi yang kondusif bagi semua pihak yang terlibat.

Perlu dikemukakan bahwa penelitian tentang topik bahasan ini belum pernah dilakukan, kecuali beberapa penelitian yang terkesan mengarah ke sana. Penelitian yang dimaksud yang berkenaan dengan konflik kepentingan antar-*stakeholders*, adalah tulisan Sonjaya (2005: 101-102) yang memetakan ragam kepentingan dan konflik antar-*stakeholders* yang terjadi di kawasan warisan budaya Dataran Tinggi Dieng dan penelitian Setyowati (2012: 1) yang berhubungan dengan manajemen konflik dalam pengelolaan sumber daya budaya.

Penelitian arkeologi di kawasan Kota Cina pernah dilakukan oleh Wibisono (1981: 115-127) tentang pemerian temuan gerabah Kota Cina, McKinnon (1984: 360-362) tentang posisi Kota Cina dalam perdagangan Asia Tenggara, Ambary (1984: 69-70) melakukan pemerian temuan

keramik Kota Cina, dan Manguin (1989: 205-206) tentang hasil analisis radiokarbon temuan fragmen kayu perahu dagang di Kota Cina. Selanjutnya, Miksic dan Teck (1992: 73-74) pernah juga menganalisis komposisi mineral gerabah Kota Cina dan membandingkannya dengan gerabah dari Thailand dan Kerajaan Majapahit. Hasil analisisnya memperlihatkan bahwa komposisi mineral gerabah Kota Cina sebagian besar sama dengan yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Koestoro (2008: 10-11) mereposisi keberadaan tinggalan masa lalu Kota Cina dalam sejarah Indonesia. Perihal penghitungan luasan dan identifikasi awal terhadap temuan di kawasan Kota Cina sudah pernah dilakukan oleh Balai Arkeologi Medan terhadap kawasan Kota Cina pada 2008 (Purnawibowo *et al.* 2008: 1-3). Soedewo *et al.* (2011: 16-54) melakukan pemerian data tambahan hasil penelitian di kawasan tersebut. Begitu juga dengan Purnawibowo (2013: 180-183) yang melakukan studi kelayakan kawasan tersebut dan hasilnya adalah pemerian beragam nilai penting di kawasan tersebut. Peret *et al.* (2013: 90-106) melakukan pemerian data lama yang diteliti kembali dan data baru hasil penelitian tahun 2011-2013, serta Chabot *et al.* (2013: 113) merekonstitusi lingkungan lama di sekitar kawasan Kota Cina.

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, kawasan Kota Cina mengandung nilai kesejarahan, yakni sebagai bandar perdagangan di pesisir timur Sumatera. Nilai ilmu pengetahuan behubungan dengan pemecahan permasalahan, selain arkeologi dan sejarah, juga geografi, maritim, lingkungan, dan sebagainya. Nilai agama dapat ditelaah mengenai keberadaan ragam religi yang pernah ada dan bagaimana interaksinya. Nilai penting kebudayaan lainnya tercermin dari sisa budaya materinya yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut tentunya memperkaya khazanah kebudayaan yang pernah ada di Kota Cina dan Kota Medan sekarang. Nilai penting sosial-ekonomi dikaitkan

dengan pemanfaatan Kota Cina sebagai kawasan permukiman dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya bila dimanfaatkan (Purnawibowo 2013: 180-182).

2. Metode

Untuk menganalisis potensi konflik dalam pengelolaan kawasan Kota Cina, pertama-tama perlu dilakukan pendeskripsian dan pengelompokan isu-isu riil yang timbul. Isu tersebut diperoleh dari hasil dengan beberapa *stakeholders* di sekitar kawasan Kota Cina. Langkah berikutnya, isu tersebut dianalisis dengan menggunakan instrumen analisis bawang bombay (*onions analysis*) untuk mengetahui klaim (posisi), kepentingan, dan kebutuhan para *stakeholders*. Setelah diperoleh hasil analisis yang didapat berupa potensi konflik antar-*stakeholders*, kemudian akan dicarikan formula tata kelolanya agar dalam pengelolaan kawasan Kota Cina kelak dapat mengakomodasi berbagai kepentingan para *stakeholders*.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil wawancara tentang persepsi masyarakat di dalam tulisan ini dibagi atas dua pengertian. Pertama, tanggapan masyarakat terhadap keberadaan kawasan Kota Cina dan rencana pengelolaannya pada masa yang akan datang. Kedua, sebagai proses pembelajaran bagi individu atau bagian dari masyarakat dalam mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Karena kedua pengertian tersebut saling kait, persepsi masyarakat dalam penelitian ini dipahami sebagai tanggapan dan bagian dari proses pembelajaran masyarakat dalam memperoleh pengetahuan seputar pengelolaan kawasan Kota Cina.

Penentuan narasumber dari warga masyarakat dilakukan secara selektif atau dipilih berdasarkan maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini, masyarakat dibagi atas tiga kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dan para pemilik lahan

yang mengandung data arkeologis. Kelompok kedua adalah masyarakat yang berdomisili di luar kawasan Kota Cina, yang lokasinya masih sangat dekat dengan kawasan tersebut. Kelompok ketiga adalah masyarakat yang tinggal di luar kawasan dan sama sekali awam tentang kawasan tersebut.

Dalam penelitian ini masyarakat kelompok pertama perlu diketahui kepentingan dan kebutuhan mereka berkaitan dengan rencana pengelolaan kawasan Cagar Budaya. Mereka adalah pemilik lahan yang akan terkena dampak langsung proses pengelolaan kawasan Cagar Budaya itu. Kelompok kedua dipilih karena mereka adalah warga masyarakat yang secara tidak langsung akan mengalami dampak negatif kegiatan pengelolaan Cagar Budaya itu. Kelompok ketiga dipilih untuk menggali persepsi masyarakat yang benar-benar awam terhadap kawasan Kota Cina dan pengelolaan kawasan Cagar Budaya. Selain itu, pemilihan kelompok keempat juga dilakukan dengan maksud penyebarluasan informasi tentang arkeologi dan edukasi kepada masyarakat awam.

3.1 Hasil Penelitian

Beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan Kota Cina diklasifikasikan berdasarkan isu di lapangan. Setidaknya ada empat isu utama yang dapat dikaji dari hasil wawancara, yaitu isu penggunaan lahan, isu penelitian dan pariwisata, isu lingkungan, serta isu penetapan Kota Cina sebagai Kawasan Cagar Budaya (KCB).

3.1.1 Isu Penggunaan Lahan

Pada awal tahun 1990-an kawasan Kota Cina sudah dipergunakan sebagai areal permukiman, perladangan, dan persawahan (pertanian sawah). Aktivitas tersebut membuktikan bahwa lahan di kawasan itu sejak dahulu sudah dimanfaatkan untuk kepentingan permukiman, ladang, dan persawahan. Perladangan dan persawahan tersebut didukung oleh

ketersediaan air tawar di daerah tersebut pada masa itu. Namun, sekarang aktivitas persawahan tidak memungkinkan lagi karena sulitnya mendapatkan air tawar. Penggunaan lahan oleh warga di sekitar kawasan Kota Cina berdampak rusak dan hilangnya data tinggalan masa lalu di kawasan tersebut. Di Keramat Pahlawan, misalnya, banyak temuan struktur bata yang sudah hancur dan hilang. Adapun struktur bata yang ditemukan hanya berupa sisa struktur yang diduga sebagai pagar keliling. Adanya aktivitas pertanian dan pembuatan tambak ikan di lokasi itu menyebabkan banyak tersingkap pecahan bata yang diduga bagian dari struktur lama. Aktivitas tersebut, selain merusak konteks temuan arkeologis, juga struktur bangunan masa lalu. Hal itu terjadi karena ketidaktahuan warga yang mengolah lahan, yang dalam pandangan mereka fragmen bata tersebut bukan sesuatu yang berharga.

Aktivitas pembuatan tambak ikan di kawasan Kota Cina disebabkan oleh kondisi lokasi yang masih dipengaruhi pasang air laut. Lokasi itu sangat cocok untuk lahan tambak ikan air payau yang hasil komoditasnya mahal di pasaran. Ketika menggali kolam tambak, warga masyarakat banyak menemukan tinggalan arkeologis, antara lain fragmen keramik, fragmen gerabah, fragmen tulang dan gigi hewan, serta benda-benda logam. Apabila kondisinya utuh, benda-benda tersebut akan mereka jual kepada peminat barang antik dengan harga mahal.

Seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk Kota Medan, dalam rencana tata ruang Kota Medan, wilayah Kota Cina termasuk ke dalam Kawasan Industri Medan (KIM). Hal itu merupakan salah satu upaya pemusatan lokasi industri dan permukiman di Kota Medan bagian utara. Dengan demikian, kawasan di wilayah Kota Cina menjadi pilihan utama pengembangan kawasan permukiman penduduk Medan. Selain harga tanah yang masih murah dibandingkan dengan kawasan Kota Medan lainnya, akses ke tempat industri dan pelabuhan juga dekat. Oleh

karena itu, kawasan itu dapat dikatakan sebagai daerah penyangga bagi Kawasan Industri Medan (KIM) dan pelabuhan Belawan, salah satu pusat perputaran roda perekonomian Kota Medan saat ini.

Dalam menetapkan Kota Cina sebagai Cagar Budaya (CB) perlu dilakukan pembebasan sebagian lahan yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai lokasi tempat tinggal, lahan pertanian, dan tambak ikan. Sementara itu, banyak juga warga yang telah mengetahui areal permukimannya merupakan bagian dari situs yang akan dijadikan CB. Ketika lahan mereka diminta untuk dibebaskan guna kepentingan perlindungan dan pelestarian Kota Cina, mereka meminta harga ganti rugi tanah dan bangunan yang cukup tinggi. Sebagai gambaran, terjadi peningkatan harga tanah dari yang sebelumnya berkisar antara Rp100.000,00 hingga Rp150.000,00 per meter persegi menjadi Rp250.000,00 hingga Rp350.000,00 per meter persegi.

Pada sekitar tahun 2007 sebelum adanya Museum Situs Kota Cina, harga tanah masih Rp50.000,00 per meter persegi. Setelah museum didirikan, harga tanah di sekitar museum naik menjadi Rp75.000,00 per meter persegi. Pada akhir tahun 2011, ketika hendak dilakukan pembebasan tanah guna kepentingan pelestarian situs Kota Cina oleh pemerintah daerah, masyarakat meminta harga Rp150.000,00 per meter persegi, sedangkan pemerintah daerah bertahan pada harga NJOP (nilai jual objek pajak), yaitu sebesar Rp75.000,00. Hingga penelitian ini dilaksanakan, harga jual tanah di lokasi sekitar situs Kota Cina telah mencapai harga Rp350.000,00 per meter persegi.

Sulitnya pembebasan Kota Cina dari permukiman penduduk adalah kenaikan harga tanah yang disebabkan oleh hal berikut: perbaikan infrastruktur jalan di lokasi tersebut, jumlah penduduk yang terus bertambah (berkaitan dengan peningkatan jumlah pendatang yang berdomisili di lokasi tersebut), munculnya sis-

tem penjualan tanah kavelingan, dan masuknya pengembang permukiman. Hal itulah yang menyebabkan rencana pembebasan sebagian lahan untuk kepentingan perlindungan dan pelestarian dalam menetapkan Kota Cina sebagai KCB menjadi terhalang.

3.1.2 Isu Penelitian dan Pariwisata

Aktivitas penelitian ilmiah yang didominasi oleh bidang arkeologi dan sejarah telah lama dilakukan oleh berbagai pihak di Kota Cina. Penelitian tersebut dilakukan sejak zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Meskipun demikian, penelitian yang intensif baru dilakukan pada 1970-an yang diinisiasi oleh E.E. McKinnon dan berlangsung hingga tahun 1983. Setelah itu, instansi pemerintah, seperti Pusat Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi Medan, Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial (Pussis), Universitas Negeri Medan (Unimed), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, juga terlibat dalam berbagai penelitian di kawasan itu, baik berupa survei, ekskavasi, maupun analisis temuan arkeologis. Penelitian tersebut telah menghasilkan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, baik di level nasional maupun internasional.

Data arkeologi yang ditemukan di Kota Cina sangat beragam jenisnya. Oleh karena itu, aspek penelitian ilmiah dapat dikatakan sebagai titik awal dari isu perlindungan dan pelestarian. Publikasi yang dihasilkan telah mendorong berbagai pihak, terutama akademisi dan pemerintah, untuk memikirkan aspek perlindungan dan pelestarian kawasan Kota Cina. Penelitian yang dilakukan tidak hanya demi kepentingan publikasi ilmiah, tetapi juga sebagai usaha untuk menyelamatkan tinggalan arkeologisnya.

Aktivitas penelitian bagi masyarakat di sekitar lokasi membawa dampak ekonomi yang positif meskipun dilakukan hanya pada waktu tertentu dan paling lama sebulan. Dalam setiap kegiatan penelitian, khususnya ekskavasi,

masyarakat di sekitar Kota Cina umumnya dilibatkan sebagai tenaga lokal untuk membantu pencarian data arkeologis. Pelibatan masyarakat itu pada dasarnya ditujukan untuk mengajak mereka berpartisipasi secara aktif sehingga turut melindungi tinggalan arkeologis di daerah itu.

Interaksi antara peneliti dan warga masyarakat yang membantu penelitian ini ikut meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai pentingnya Kota Cina bagi ilmu pengetahuan. Hal itu juga memperlihatkan adanya dampak positif bagi masyarakat di sekitar kawasan, terutama warga masyarakat yang lahannya dijadikan lokasi penelitian arkeologis, dalam memahami nilai pentingnya kawasan Kota Cina sebagai Cagar Budaya.

Seiring dengan aktivitas penelitian, terlihat juga pemanfaatan Kota Cina sebagai objek wisata. Pada awalnya aktivitas pariwisata masih terfokus pada keindahan Danau Siombak, sedangkan tinggalan masa lalu Kota Cina itu sendiri belum menjadi perhatian para wisatawan. Perlu diketahui bahwa Danau Siombak semula berasal bekas lokasi penambangan pasir yang digunakan untuk pembuatan jalan tol Belawan–Tanjung Morawa yang lama kelamaan menjadi kolam besar.

Seiring dengan berkembangnya museum situs yang dibuka untuk wisata, terjadi pula peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai pentingnya Kota Cina bagi ilmu pengetahuan. Hal tersebut terlihat dari mulai banyaknya warga masyarakat yang memiliki atau menemukan benda antik yang kemudian diserahkan kepada museum situs tersebut. Pengelola museum situs sejak tahun 2008 secara aktif juga melakukan pengenalan kawasan Kota Cina kepada para pelajar dan guru di Kota Medan dan sekitarnya. Aktivitas penelitian dan pariwisata yang mengedepankan peran peneliti dan pengelola museum di kawasan tersebut berdampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai pentingnya Kota Cina bagi ilmu pengetahuan.

Jauh sebelum hadirnya museum, ada beberapa investor yang membuka usaha pengembangan pariwisata di Danau Siombak. Salah satu di antaranya adalah penyediaan sarana wisata perahu mesin yang dapat mengangkut lebih dari sepuluh orang untuk berkeliling Danau Siombak dan juga menyusuri saluran parit hingga ke Sungai Belawan. Akan tetapi, banyak di antara fasilitas wisata tersebut sekarang telah rusak atau tidak dapat digunakan lagi. Hal itu sangat disayangkan karena banyak aktivitas wisata bahari yang dapat dilakukan di sini dengan menggunakan perahu, mulai dari memancing, menikmati keindahan danau, hingga menikmati lingkungan daerah pesisir yang aliran sungainya memiliki meander dan kelokan yang terkadang saling bertemu.

3.1.3 Isu Lingkungan

Lingkungan di kawasan Kota Cina dapat diklasifikasikan ke dalam kategori lahan basah alami pada jenis ekosistem *mangrove* yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air tawar dan payau dari muara Sungai Belawan. Kategori lahan basah alami yang utama di Indonesia adalah *lebak*, danau air tawar, rawa air tawar, rawa pasang surut air tawar dan air payau, hutan rawa, lahan gambut, dataran banjir, pantai terbuka, estuari, hutan *mangrove* dan hamparan lumpur lepas pantai (*mud flat*). Kategori lahan basah buatan yang utama di Indonesia adalah waduk, sawah, perkolaman air tawar dan tambak (Notohadiprawiro 2006: 1).

Keberadaan lahan basah alami di kawasan Kota Cina berfungsi strategis sebagai penyedia tumbuhan yang dapat dimanfaatkan daun, buah, dan batangnya; imbuhan (*recharge*) air tanah; pengendali banjir; pengukuh (*stabilize*) garis pantai; pengendali erosi; penambat sedimen hara dan bahan beracun; serta pengukuh iklim mikro (Notohadiprawiro 2006: 1-2). Berkenaan dengan berbagai fungsi strategis tersebut, lahan basah alami di kawasan Kota Cina telah dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai

lokasi pengambilan daun nipah untuk atap rumah, pencarian lokan (*kepah*), dan suplai air bagi tambak ikan. Adapun fungsi strategis lain kawasan Kota Cina adalah sebagai daerah bekal (*supply*) air, terutama air tawar agar tidak langsung masuk ke air laut.

Berdasarkan aspek geografisnya, Kota Cina diapit oleh aliran Sungai Belawan dan Sungai Deli yang bermuara ke Selat Malaka. Di antara Sungai Belawan dan Kota Cina banyak terdapat aliran anak sungai yang oleh warga disebut sebagai parit dengan alur yang bermeander (berkelok). Kota Cina merupakan bentang lahan relatif datar yang pembentukannya terjadi akibat sedimentasi endapan kedua sungai tersebut dengan vegetasi khas pesisir yang mendominasi lingkungan. Selain itu, kawasan Kota Cina merupakan daerah yang dipengaruhi langsung oleh dinamika pasang naik dan pasang surut air laut yang mengalir melalui sungai-sungai kecil yang menghubungkan kawasan itu dengan muara Sungai Belawan. Sedimen tanah yang menjadi matriks data arkeologi hasil penelitian yang telah dilakukan juga menunjukkan kawasan itu dahulu adalah pinggir laut.

Berdasarkan hasil penelusuran informasi dari warga setempat, pada dahulu hingga awal tahun 1990-an air tawar di permukaan tanah masih banyak dijumpai di kawasan Kota Cina dan berfungsi sebagai sarana pengairan sawah. Di kawasan tersebut juga masih banyak dijumpai hutan bakau dan nipah pada ekosistem *mangrove*. Sejak kawasan tersebut dijadikan areal permukiman dan mulai ramai dengan pembukaan tambak ikan, tanaman bakau mulai ditebangi dan kayunya banyak digunakan untuk bahan pembuatan arang tanpa adanya upaya regenerasi tanaman itu.

Kondisi yang dikemukakan di atas berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan, khususnya kemudahan dalam mengakses air tawar permukaan. Hal itu juga disebabkan oleh hilangnya salah satu jenis

vegetasi pendukung ekosistem *mangrove*, yaitu tanaman bakau. Pada dasarnya pohon bakau dan nipah merupakan komponen utama penyusun ekosistem *mangrove* di kawasan pesisir. Hilangnya salah satu komponen utama dalam sebuah ekosistem akan berdampak pada hilang dan melemahnya salah satu fungsi utama ekosistem tersebut (Daryono, Atok S., dan Tajudin E.K. 2010: 6). Pada ekosistem *mangrove* yang menjadi lingkungan fisik kawasan Kota Cina, kekuatan penahan bekal air tawar dan imbuhan air tawarnya sudah rusak sehingga air tawar di permukaan sudah tidak ada lagi.

Kondisi penurunan kualitas lingkungan tersebut dibuktikan oleh sulitnya mendapatkan air tawar di kawasan Kota Cina. Berkurangnya komponen pendukung ekosistem *mangrove* mengakibatkan munculnya air payau di sumur rumah warga pada kedalaman kurang dari satu meter. Air tawar baru didapat dengan cara mengebor lapisan tanah hingga kedalaman sekitar 50 m. Hal itu dapat dikatakan sebagai kondisi penurunan kualitas lingkungan.

Vegetasi di sepanjang alur meander sungai-sungai kecil yang menghubungkan Kota Cina dan Sungai Belawan didominasi oleh tanaman nipah yang cukup rapat hingga menyerupai hutan nipah. Namun, vegetasi *mangrove* di sekitarnya sudah jauh berkurang, bahkan tidak ada lagi. Kondisi demikian juga dapat dilihat dari vegetasi yang tumbuh di sekeliling Danau Siombak. Padahal, pohon *mangrove* dan nipah adalah benteng terakhir dan juga indikator rusak tidaknya sebuah ekosistem di daerah yang masih dipengaruhi langsung oleh dinamika pasang naik dan pasang surut air laut.

Pohon nipah, selain memiliki nilai ekologi, juga nilai ekonomi, sebagaimana terlihat dalam usaha beberapa warga di sekitar Kota Cina sebagai pencari daun nipah untuk atap rumah. Pada umumnya rumah masyarakat di sekitar lingkungan pesisir timur Sumatera Utara masih menggunakan atap rumbia atau nipah. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar

Kota Cina tetap memelihara kearifan lokal dalam melestarikan tanaman tersebut.

Degradasi lingkungan di sekitar Kota Cina tentunya akan berdampak pada kerusakan tinggalan masa lalunya. Lingkungan yang dipengaruhi oleh dinamika pasang naik dan pasang surut air laut yang bersifat korosif dan merusak dapat memengaruhi kualitas data arkeologis yang masih tertanam di bawah tanah. Hal itu terlihat dengan membandingkan temuan berbahan perunggu di daerah yang jauh dari pengaruh air laut dengan objek berbahan perunggu yang ditemukan di lokasi yang matriknya langsung dipengaruhi air laut. Objek yang ditemukan jauh dari daerah di pedalaman hanya memperlihatkan sedikit jejak *patinasi* berwarna hijau dan unsur karat sehingga bentuk utuhnya masih dapat dianalisis dengan mudah. Objek yang ditemukan di daerah yang pengaruh air lautnya cukup kuat memperlihatkan kondisi objek yang sudah tidak jelas dan unsur karat dominan di seluruh bagian, interpretasi hanya dapat dilakukan berdasarkan bentuk bagian objek yang masih tampak jelas.

Intrusi air laut (perembesan air laut ke dalam lapisan tanah sehingga bercampur dengan air tanah) yang sudah sejak lama terjadi membuat warga sangat kesulitan mengakses air tawar dan bersih di Kota Cina. Salah satu unsur utama penyelamatan dan perlindungan Kota Cina adalah penyelamatan dan perbaikan kualitas lingkungannya. Kondisi suatu Cagar Budaya yang memiliki sifat tidak dapat diperbarui sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam yang melingkupinya. Degradasi lingkungan alam di Kota Cina tidak boleh dianggap remeh. Penurunan kualitas lingkungan berpengaruh pada terlindungi dan terlestarikannya daerah itu, di samping aktivitas manusia yang melindungi dan melestarikan tinggalan masa lalunya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerusakan tinggalan masa lalu, selain oleh faktor pemanfaatannya oleh manusia, juga dipengaruhi oleh kualitas lingkungan alamnya.

3.1.4 Isu Penetapan Kawasan Cagar Budaya

Salah satu faktor utama yang menyebabkan eksploitasi Kota Cina adalah belum adanya status penetapan Kota Cina sebagai Cagar Budaya. Penetapan suatu tinggalan masa lalu menjadi Cagar Budaya telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyatakan bahwa penetapan status Cagar Budaya dikeluarkan oleh bupati atau wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya. Mekanisme tersebut kemudian dilanjutkan lagi pada Pasal 35 yang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten atau kota menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah. Berdasarkan aturan legal formal tersebut, kawasan Kota Cina harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah Kota Medan setelah menerima surat rekomendasi dari tim ahli Cagar Budaya.

Prosedur di atas tampaknya mudah dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaannya muncul permasalahan pembebasan lahan, seperti perbedaan harga tanah yang diajukan oleh pemerintah dan harga yang diinginkan warga. Semakin lama ditunda pembebasan lokasi yang mengandung Cagar Budaya di daerah tersebut akan semakin tinggi harganya. Hal itu disebabkan oleh kawasan di sekitarnya sudah memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena berdekatan dengan pelabuhan, kawasan industri penyangga pelabuhan, serta daerah pengembangan permukiman Kota Medan.

Permasalahan lain dalam penetapan Cagar Budaya Kota Cina yang dipandang cukup pelik adalah ketiadaan data monumental yang harus dipelihara dan dilestarikan secara kasat mata. Temuan struktur bata di Keramat Pahlawan sejatinya bisa dijadikan titik awal aktivitas perlindungan dan pelestarian yang kemudian

menetapkan Kota Cina sebagai KCB, tetapi terkendala lagi pada pembebasan lahan. Bila struktur bata akan dikupas secara keseluruhan, hal itu berarti bangunan *pekong* dan perumahan yang ada di dekat areal struktur bata harus dibongkar. Struktur bata tersebut, berdasarkan interpretasi Soedewo *et al.* (2011: 16) adalah bagian dari pagar keliling sebuah bangunan suci. Asumsinya kemudian adalah bahwa apabila pagar kelilingnya saja sudah berada di sekitar lokasi perumahan yang telah dibangun pondasinya, dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membebaskan dan membongkar perumahan tersebut, belum termasuk biaya pembongkaran sisa struktur bata di dalam sumur salah satu rumah warga.

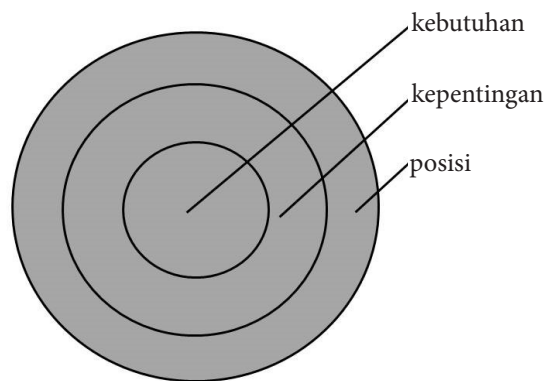
Penetapan Kota Cina sebagai Cagar Budaya bagaikan dua sisi mata uang logam yang selalu saling bertolak belakang. Pada satu sisi penetapan tinggalan masa lalu yang diawali dengan pembebasan lahan akan berjalan dengan baik jika sesuai dengan harga yang diminta oleh penduduk. Pada sisi lain, sebagai penyedia dana pembebasan lahan, pemerintah tidak dapat memenuhi harga yang diminta oleh penduduk. Pada kondisi seperti ini, jika belum ada kesepakatan harga lahan antara pemerintah dan penduduk setempat, penetapan kawasan Kota Cina sebagai Cagar Budaya akan semakin tertunda. Padahal, adanya kegiatan pelestarian dan perlindungan Cagar Budaya Kota Cina akan berdampak positif pada warga sekitar, misalnya peluang pekerjaan.

3.2 Pembahasan

Berbagai kondisi dan isu yang telah diuraikan berkenaan dengan pengelolaan warisan budaya di Kota Cina menunjukkan indikasi munculnya konflik. Suatu konflik terjadi apabila tujuan *stakeholders* (masyarakat, akademisi, dan pemerintah) tidak sejalan (Fischer *et al.*), 2001: 4; Sonjaya 2005: 101; Setyowati 2012: 2, 6). Salah satu konflik yang terjadi dalam usaha perlindungan dan pelestarian Kota Cina adalah

perbedaan harga tanah sehingga kawasan itu tidak jadi dicagarbudayakan. Peta konflik lainnya akan terlihat di dalam Tabel 1.

Konflik yang muncul terkait dengan pemanfaatan segala jenis potensi yang dimiliki kawasan Kota Cina pada dasarnya berakar pada kebutuhan dasar pihak-pihak di sekitar Kota Cina tersebut yang tidak atau belum terpenuhi. Oleh karena itu, hal yang paling penting dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, lalu memberikan solusi pemenuhannya. Salah satu alat bantu untuk menganalisis konflik yang seperti ini adalah analogi bawang bombay (lihat Gambar 2) di bawah ini (Setyowati 2012: 6).



Gambar 2. Analisis Bawang Bombay (Sumber: Setyowati 2012: 13)

Isu pengelolaan Kota Cina dibalut dalam lapisan seperti halnya bawang bombay. Menurut Setyowati (2012: 6) lapisan terluar merupakan posisi *stakeholders* di depan umum, yang dapat dilihat dan didengar oleh semua pihak. Posisi tersebut dapat lebih mudah dipahami bila diartikan sebagai klaim¹ para *stakeholders*. Klaim biasanya berupa sesuatu yang dinyatakan berkaitan dengan fakta, dalam hal ini pengelolaan kawasan Kota Cina. Lapisan kedua adalah kepentingan *stakeholders* yang akan dicapai dalam situasi tertentu. Kepentingan tersebut dapat diketahui dengan memunculkan pertanyaan yang berkaitan dengan mengapa melakukan suatu klaim. Lapisan terakhir yang

¹ Klaim dapat diartikan sebagai tuntutan pengakuan atas fakta bahwa seseorang berhak atas sesuatu (KBBI 2008: 782).

menjadi inti adalah kebutuhan terpenting *stakeholders* yang harus dipenuhi. Agar kebutuhan para *stakeholders* dapat diketahui, diajukanlah pertanyaan mengapa setiap *stakeholders* memiliki kepentingan. Pertanyaan itu akan bermuara pada jawaban yang merujuk pada kebutuhan mendasar, seperti penghasilan, identitas, dan aktualisasi diri.

Penggunaan analisis bawang bombay dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ke arah mana pergerakan setiap pihak, dan memahami posisi (klaim), kepentingan, dan kebutuhan setiap *stakeholders*. Selain itu, analisis tersebut bertujuan untuk mencari titik kesamaan di antara kelompok yang kemudian dijadikan dasar pembahasan berikutnya. Analisis tersebut juga dapat digunakan untuk memahami dinamika situasi suatu konflik, persiapan dialog antarkelompok dalam suatu konflik, serta dipakai dalam proses mediasi atau negosiasi (Sonjaya 2005: 102; Setyowati 2012: 6). Adapun alasan pemilihan analisis bawang bombay dalam penelitian ini adalah untuk memahami dinamika situasi suatu konflik bila kawasan Kota Cina akan dijadikan kawasan Cagar Budaya. Hasil penjabaran dalam bentuk matriks dari analisis bawang bombay diperlihatkan pada tabel 1.

Pada kolom posisi tampak perbedaan klaim di antara pihak yang terlibat di Kota Cina. Perbedaan itu terletak pada keragaman aktivitas pemanfaatan kawasan Kota Cina, yang dapat memunculkan klaim yang saling bertolak belakang. Sebagai contoh, klaim Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Besar dengan klaim masyarakat di kawasan Kota Cina yang sama-sama menggunakannya untuk beraktivitas. Beberapa aktivitas tersebut, menurut BPCB Aceh Besar, telah dan akan mengancam tinggalan arkeologis. Meskipun demikian, ada juga beberapa pihak yang memiliki klaim dengan tujuan yang sama, yaitu BPCB Aceh Besar dan Museum Situs Kota Cina.

Berdasarkan pertanyaan mengapa sampai terjadi klaim, pada kolom ini dapat diketahui

Tabel 1. Hasil Analisis Bawang Bombay: Ragam Posisi, Kepentingan, dan Kebutuhan

Pihak	Posisi	Kepentingan	Kebutuhan
BPCB Aceh Besar	Sebagai pelaksana UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta memiliki kewenangan melarang semua aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatannya yang bertentangan dengan perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya.	Menciptakan kondisi yang optimal dalam pengelolaan CB untuk tujuan pelestarian dan perlindungan.	Lahan dan pengelolaan CB yang berbasis pelestarian cagar budaya.
Pemerintah Kota dan Pemprov. Sumut diwakili Disbudpar	Pihak yang menetapkan Kota Cina sebagai kawasan cagar budaya yang akan melakukan pembebasan lahan.	Menjadikan Kota Cina sebagai kawasan cagar budaya untuk dikelola yang nantinya akan meningkatkan PAD.	Lahan dan uang.
Masyarakat Umum di sekitar Kota Cina pengguna lahan	Masyarakat memanfaatkan lahan untuk permukiman, arena memancing, mencari daun nipah, tambak ikan, pangkalan perahu nelayan, beribadah, mencari dan menjual barang antik.	Memanfaatkan ruang untuk beraktivitas sehari-hari.	Lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak adanya pekerjaan sampingan warga setempat bila KCB Kota Cina ini dikelola.
Wisatawan	Penikmat Kota Cina dan Danau Siombak.	Mendapatkan suguhan wisata menarik dan pelayanan jasa pariwisata yang memuaskan.	Lokasi untuk bersenang-senang dan mendapat tambahan pengetahuan tentang masa lalu.
Museum Kota Cina	Pengelolaan Museum Situs Kota Cina	Melaksanakan (salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi) pengabdian masyarakat.	Lahan untuk media pendidikan di luar bangku sekolah.
Akademisi (arkeolog, dosen, dan mahasiswa)	Peneliti, pengkaji, fasilitator.	Pengembangan ilmu pengetahuan.	Kepuasan dan tanggung jawab intelektual.

berbagai kepentingan, padahal hanya bentuknya yang berbeda. Sebagai contoh, kepentingan BPCB Aceh Besar, Museum Situs Kota Cina, dan Akademisi, yang ternyata sama-sama berkepentingan untuk melestarikan kawasan Kota Cina, bentuk aktivitas dan tujuannya yang berbeda.

Pada kolom kebutuhan, *stakeholders* sama-sama memerlukan lahan untuk menghasilkan uang atau beraktivitas untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari dan sarana berekspresi masyarakat. Kesamaan kebutuhan inilah yang menjadi dasar pengelolaan kawasan Kota Cina tersebut, kemudian mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, diketahui juga bahwa ada kebutuhan *stakeholders* yang sama, yaitu lahan. BPCB Aceh Besar dan Pemko Medan sama-sama membutuhkan Kota Cina sebagai kawasan Cagar Budaya walaupun kepentingannya berbeda (lihat Tabel 1). Namun,

ada juga *stakeholders* lainnya membutuhkan lahan untuk memperoleh penghasilan.

Hasil observasi di lapangan juga memperlihatkan gambaran umum mengenai persepsi dan harapan masyarakat di sekitar kawasan tersebut berkenaan dengan pengelolaan kawasan Kota Cina (lihat Tabel 2). Persepsi dan harapan masyarakat yang terangkum pada tabel tersebut dapat dijadikan alat bantu dalam mengelola konflik di kawasan tersebut.

Pada prinsipnya potensi konflik, bila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan kerugian atau bahaya. Sebaliknya, bila dikelola dengan baik, konflik bisa menjadi peluang

dalam melakukan perubahan yang bersifat membangun. Ada empat cara untuk mengelola konflik, yaitu koersi, arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Mediasi dan negosiasi dipandang sebagai cara pengelolaan konflik yang paling baik untuk jangka panjang, sedangkan koersi dan arbitrase lebih baik digunakan untuk jangka pendek. Analisis bawang bombay dapat dijadikan sebagai acuan pengelolaan konflik melalui proses mediasi atau negosiasi (Setyowati 2012: 2, 5). Karena pengelolaan kawasan arkeologis merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan, negosiasi dipilih sebagai alat pengelola konflik tanpa menggunakan pihak ketiga dan

Tabel 2. Pandangan dan Harapan Masyarakat Kota Cina

Isu Pengelolaan Kota Cina	Nilai Penting Kota Cina Versi Masyarakat di Sekitar Kawasan	Harapan Masyarakat di Sekitar Kawasan Kota Cina
Penggunaan Lahan	Lahan yang mengandung tinggalan arkeologis memiliki nilai jual ekonomi tinggi (nilai penting ekonomi).	<ul style="list-style-type: none"> a. Harga sesuai dengan permintaan masyarakat sehingga mereka mendapatkan keuntungan ekonomi, lalu mereka akan bermukim di lokasi yang steril dari tinggalan arkeologis di sekitar KCB Kota Cina. b. Pembukaan peluang kerja bersifat tetap.
Penelitian dan Pariwisata	Penelitian dan pariwisata melibatkan masyarakat di sekitar kawasan, dan masyarakat mendapatkan bayaran (nilai penting ekonomi).	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian yang akan dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat walaupun bersifat temporer. b. Pembukaan peluang kerja yang bersifat temporer dan tetap. c. Pariwisata dilakukan dengan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan.
Degradasi Lingkungan dan dampaknya terhadap Kota Cina.	Pelestarian lingkungan di sekitar kawasan Kota Cina berpengaruh pada masyarakat dan pelestarian tinggalan masa lalu (nilai penting ekonomi dan ekologi).	<ul style="list-style-type: none"> a. Perbaikan kondisi lingkungan agar ketersediaan air bersih dapat terpenuhi dan keberadaan ikan tangkapan nelayan semakin banyak. b. Lingkungan dan tinggalan arkeologisnya tidak terkena dampak intrusi air laut.
Penetapan Kota Cina sebagai Cagar Budaya.	Potensi peningkatan kesejahteraan hidup (nilai penting ekonomi).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar kawasan Kota Cina, dalam pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya. b. Pembukaan peluang kerja yang bersifat tetap. c. Berkat status kawasan yang dilindungi, lahan mereka memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

para *stakeholders* yang berkonflik bernegosiasi untuk membuat kesepakatan. Pada negosiasi arkeolog harus mampu menjadi fasilitator dan pengontrol kegiatan perlindungan sumber daya arkeologi tanpa mengesampingkan masyarakat dan pemerintah serta dapat mengembangkan hubungan dan mengevaluasi relasi antara sumber daya arkeologi dan masyarakat (Hodder 2011: 21; Okamura dan Matsuda 2011: 1-3).

Sehubungan dengan hasil observasi yang terangkum dalam Tabel 2, persepsi dan harapan masyarakat yang paling menonjol di kawasan Kota Cina adalah nilai penting ekonomi, baik terhadap tinggalan arkeologis maupun lahannya. Beragamnya persepsi itu dapat dikategorikan sebagai pandangan optimis terhadap terbukanya peluang kerja baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka berharap untuk dilibatkan secara aktif dalam proses pengelolaan Kota Cina, baik dalam kegiatan pelestarian maupun pemanfaatannya sebagai kawasan Cagar Budaya.

Upaya negosiasi dapat diwujudkan melalui pembuatan kesepakatan bersama dengan melibatkan warga masyarakat setempat dalam kegiatan pelestarian dan pengelolaan kawasan Kota Cina. Pemberian porsi peranan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan di kawasan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Hal itu dilakukan seiring dengan sudah ditinggalkannya paradigma pembebasan lahan secara besar-besaran untuk penetapan kawasan Cagar Budaya dan menilik kemampuan ekonomi negara. Masyarakat diharapkan secara sadar turut aktif mendukung usaha pelestarian, yang pada saatnya kelak mereka akan memperoleh manfaat langsung dari keberadaan Cagar Budaya.

4. Penutup

Berdasarkan analisis *stakeholders* yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa simpul konflik terletak pada penggunaan lahan

untuk kebutuhan hidup manusia dan pelestarian sumber daya arkeologi. Adapun cara mengelola konflik yang dilakukan adalah melalui negosiasi. Negosiasi dapat diwujudkan dalam bentuk musyawarah dan dialog untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Di dalam kesepakatan itu diberi porsi atau peluang kepada masyarakat sebagai salah satu *stakeholders* dalam pengelolaan kawasan Kota Cina terkait dengan penilaian, harapan, dan persepsi masyarakat sebagai tinggalan arkeologis. Dalam hal ini, arkeolog dan pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengontrol pelestarian sumber daya arkeologi tersebut.

Dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan Kota Cina sebagai Cagar Budaya, masyarakat diharapkan memiliki peran dan sikap positif karena ada keterkaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Karena pemilik kebudayaan adalah masyarakat, pelestariannya pun harus muncul dari masyarakat itu sendiri. Di pihak lain, peran pemerintah lebih difokuskan pada penyiapan regulasi atau peraturan, baik dalam bidang pelestarian, pengembangan, maupun pemanfaatan Cagar Budaya.

Daftar Pustaka

- Ambary, Hasan Muarif. 1984. "Further Notes on Classification of Ceramics from the Excavation of Kota Cina." In *Studies on Ceramic*, 63–72. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh. 2012. "Monitoring Pra Penataan Lingkungan di Kabupaten Samosir, Monitoring Situs-Situs yang Dipelihara di Kota Medan dan Sekitarnya Tahun 2012." Laporan Monitoring. Aceh Besar: BPCB Aceh.
- Chabot, Yohan, Y. Le Drezen, N. Limondin-Lozouet, and B. Sulistyanto. 2013. "Reconstitution Paléoenvironnementale Des Dynamiques Paysageres Durant Le Dernier Millenaire Aux Abordds Du Site Archéologique de Kota Cina (Sumatera-Nord, Indonésie): Resultats Preliminaires." *Archipel* 86: 113–30.

- Fischer, Simon, Dekha Ibrahim, Richard Smith, Jawed Ludin, Steve Williams, and Sue Williams. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Terjemahan*. Jakarta: The British Council.
- Hodder, Ian. 2011. "Is a Shared Past Possible? The Ethics and Practice of Archaeology in the 21st Century." In *New Perspectives In Global Public Archaeology*, edited by Akira and Katsuyuki Okamura Matsuda, 19–18. New York: Springer.
- Koestoro, Lucas Partanda. 2008. "Kota Cina dalam Sejarah Indonesia, Seminar Arti Penting Situs Kota Cina (Medan) dalam Sejarah dan Pengintegrasian dalam Pengajaran di SMP/SMA. Universitas Negeri Medan 23 Februari 2008." Medan.
- Little, B.J. 2002. "Archaeology as a Shared Vision." In *Public Benefits of Archaeology*, edited by Barbara J Little, 3–19. Florida: University of Florida Press.
- McKinnon, Edmund Edwards. 1984. "Kota Cina Its Context and Meaning in The Trade of Southeast Asia in The Twelfth to Fourteenth Centuries." Disertasi. London: Cornell University.
- Miksic, John N., and Yap Choon Teck. 1992. "Compositional Analysis of Poetry from Kota Cina, North Sumatera: Implications for Regional Trade During the Twelfth to Fourteenth Centuries A.D." In *Asian Perspectives* 31:57–76.
- Notohadiprawiro, Tejoyuwono. 1996. "Pemanfaatan Lahan Basah: Kontroversi yang Tidak ada Habisnya." *Berita HITI* IV (12) : 20–22.
- Oetomo, Repelita Wahyu, Deni Sutrisna, and Churmatin Nasoichah. 2015. Perataan Situs Kota Cina, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Laporan Peninjauan Arkeologi. Medan: Balai Arkeologi Medan.
- Okamura, Katsuyuki and Akira Matsuda. 2011. "Introduction: New Perspective in Global Public Archaeology." In *New Perspectives In Global Public Archaeology*, edited by Akira Matsuda and Katsuyuki Okamura, 1–18. New York: Springer.
- Perret, Daniel, Heddy Surachman, Ery Soedewo, Repelita Wahyu Oetomo, and Mudjiono. 2013. "The French-Indonesian Archaeological Project in Kota Cina (North Sumatera): Preliminary Results and Prospects." *Archipel* 86: 73–111.
- Purba, Jonny. 2002. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Edited by Jonny Purba. Jakarta: Yayasan Obor dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Purnawibowo, Stanov. 2013. "Studi Kelayakan Arkeologi di Situs Kota Cina, Medan (Studi Awal dalam Kerangka Penelitian Arkeologi)". *Berkala Arkeologi Sangkhakala XVI* (2):170–18.
- Purnawibowo, Stanov. et al. 2008. Laporan Remaping Situs Kota Cina di Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Laporan Remaping. Medan: Balai Arkeologi Medan.
- Setyowati, Endah. 2012. "Modul Workshop Analisis Konflik untuk Isu-Isu Arkeologi Publik." Yogyakarta: Program Studi S-2 FIB Universitas Gadjah Mada, 25--26 Juni 2012.
- Soedewo, Ery, Erond Damanik, Hernauli Sipayung, and Ater Budiman Sinaga. 2011. "Penelitian Situs Dunia di Sumatera Utara Situs Kota Cina. Medan." Laporan Penelitian Arkeologi. Medan: Balai Arkeologi Medan.
- Sonjaya, Jajang Agus. 2005. "Pengelolaan Warisan Budaya di Dataran Tinggi Dieng: Kajian Lansekap, Sejarah Pengelolaan, dan Nilai Penting." Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- Wibisono, Sonny Chr. 1981. "Tembikar Kota Cina: Sebuah Analisis Hasil Penggalan Tahun 1979 di Sumatera Utara." Skripsi. Jakarta: Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.

Sumber online:

Daryono, Herman, Atok S., and Tajudin E.K. 2010. "Pengembangan Sumber Benih Unggul Nipah (*Nypa Fruticans Wurb*) Penghasil Nira yang Produktif sebagai Sumber Bioetanol". <http://km.ristek.go.id/assets/files/Kehutanan/376%20D%20n/376.pdf>. Diakses Selasa, 01 Juli 2014.